

MEMPERTEMUKAN TRADISI DAN MODERNITAS DALAM PENDIDIKAN PESANTREN DI ERA GLOBALISASI

Muhammad Masyhuri
Institut Agama Islam Syarifuddin Lumajang, Indonesia
E-mail: muhamasyhur@gmail.com

Abstrak: Di era globalisasi yang serba modern, kehidupan berlangsung dalam suatu kondisi dan situasi yang terasa sangat berbeda dengan era sebelumnya yang tradisional. Perbedaan tersebut dialami oleh tiap orang yang merasakan kehidupannya secara lokal, memaksa tiap tubuh menjadi individualis, meski tiap momen secara kontekstual berlangsung dalam waktu dan ruang tertentu secara cepat. Transformasi lokasi, keterbatasan aktifitas yang bersifat lokalitas, serta munculnya berbagai bentuk pengalaman yang sentralistik telah merubah dunia saat ini secara radikal. Perubahan-perubahan ini tidak saja menjadi fenomena dunia yang bersifat individualis namun juga secara umum menggambarkan aktivitas sosial yang saling terjalin dengan kehidupan sosial lainnya. Meski setiap orang hidup dalam kontek lokal, namun fenomena dunia yang terjadi sesungguhnya berlangsung secara cepat dan global. Dilematika modernitas bagi tiap orang ini juga menjadi problem bagi kalangan Sufi di pesantren. Pesantren sebagai sebuah institusi pendidikan Islam memiliki peran strategis dalam pembentukan masa depan masyarakat Islam di Indonesia, meskipun demikian, seringkali pesantren terjebak kepada dikotomi antara tradisional dan modern, sehingga seringkali lulusan pesantren menjadi asing dengan realitas sosial dan kebutuhannya. Tulisan ini berupaya mengkaji ulang tentang pendidikan di pesantren yang menjadi dilematik bagi para sufi, agar dapat dirumuskan strategi pencapaian pendidikan multi-dimensional secara fenomenologis, sehingga, dari kajian ini dapat dirumuskan pembacaan awal tentang bagaimana alumni Pesantren nantinya bisa mengikuti perubahan situasi dan kondisi di masa mendatang.

Kata kunci: tradisi, modernitas dan pesantren

Pendahuluan

Tradisi dan modernitas sering dipahami sebagai dua istilah yang saling berlawanan makna, baik dalam konseptualisasinya serta polarisasi yang muncul dalam karakteristik yang berbeda satu sama lain dalam aspek keagamaan, budaya, sosial dan lainnya. Begitu pula dalam respon tradisi atas modernitas juga memunculkan selain penerimaan modernitas bagi tradisinya, namun juga ada yang menolak tradisi atas

modernitas.¹ Penerimaan tradisi atas modernitas dipahami sebagai bentuk negosiasi yang dimaksudkan pada dimungkinkannya adanya ruang dialog bagi tradisi untuk merespon modernitas dengan cara berbeda, atau lebih ekstrem justru tradisi dan modernitas merupakan polarisasi yang justru *debatable*, dimana diantara keduanya justru dapat dipertemukan. Dengan Bahasa yang berbeda, dimungkinkannya terdapat elemen yang pra-modern dan elemen yang modern berkumpul dalam satu elemen yang sama.

Dalam beberapa literature ilmu sosial, perubahan sosial dalam masyarakat dapat didekati dari sebuah model “*before-and after*”. Dalam konteks ini, struktur sosial lama dibedakan oleh dua struktur yang dikotomis dan orang akan mengalami kesulitan bila memahami masing-masing perangkat mewakili sistem umum dari keduanya. Berdasarkan pemaknaan ini masyarakat diklasifikasikan menurut tingkatan yang menghubungkan salah satu perangkat sifat dari pada yang lain, yang kemudian menghasilkan sebuah susunan dan urutan dari berbagai masyarakat dalam hubungannya dengan perubahan. Masyarakat tradisional dan modern yang dipertentangkan satu sama lain dalam perspektif ini, dalam banyak hal, masing-masing dinyatakan sebagai tipe “tertutup”.²

Perbedaan mendasar antara masyarakat tradisional dengan masyarakat modern, dimana tradisional disimpulkan sebagai masyarakat statis dengan memiliki diferensiasi atau spesialisasi, tingkat urbanisasi dan literasi yang rendah. Sebaliknya, masyarakat modern ditandai oleh adanya diferensiasi, urbanisasi, literasi, dan terbiasa dengan *mass-media*. Dalam dunia politik, masyarakat tradisional menggantungkan pada elit “tradisional” yang memerintah berdasarkan mandat dari Tuhan, sementara masyarakat modern mendasarkan pada partisipasi yang luas dari rakyat, yang tidak menghormati bentuk legitimasi politik tradisional dan menetapkan penguasa sebagai pihak yang bertanggungjawab berdasarkan nilai-nilai sekuler dan prinsip efisiensi. Di samping itu, masyarakat tradisional dikenal sebagai terikat oleh batas budaya yang diciptakan oleh tradisinya sendiri, sedang masyarakat modern secara kultur adalah dinamis, menerima perubahan, pembaharuan, menjunjung tinggi nilai rasionalitas,

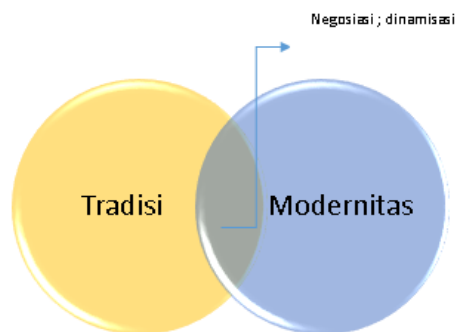
¹ Momen, M. *The Phenomenon of Religion* (Oxford: Oneworld, 1999), 176.

² Martono, N. *Sosiologi Perubahan Sosial* (Jakarta: Raja Grafindo Persada 2012)

selalu *up-to-date*, dan maju. Siapa saja yang dikaitkan dengan keyakinan, praktik, serta institusi tradisional dikelompokkan sebagai “reaksioner” atau “konservatif”.³

Modernitas suatu masyarakat secara langsung dikaitkan dengan karakteristik spesialisasi yang terstruktur dan berbagai ragam mobilisasi sosial. Semakin tinggi tingkat spesialisasi yang dimiliki oleh seseorang, maka semakin kecil sikap tradisional yang dimilikinya, dan karena itu, implikasinya, semakin bisa mengembangkan spesialisasi ini secara terus menerus berkaitan dengan berbagai persoalan baru dan kekuatan sosial. Dalam kaitan ini sikap tradisional dipandang sebagai “*unproblematic*.” Semakin banyak teori cabang ilmu sosial berkembang, semakin sedikit ketertarikan elemen tradisional yang ada dalam masyarakat. Karena itu tradisi merupakan sebuah kategori residual, sebagai gangguan intelektual yang harus dihilangkan. Dari perspektif pewarisan nilai-nilai secara turun temurun, modernitas pada akhirnya juga akan melahirkan sebuah tradisi. Tetapi berbeda dengan tradisi yang mengagungkan kejayaan masa lalu sebagai satu-satunya kebenaran, maka tradisi modernitas akan melahirkan nilai-nilai yang berkaitan dengan pemecahan persoalan kekinian dan yang akan datang.

Bagan 2.1. negosiasi antara tradisi dan modernitas



Dalam konteks tradisi Islam di Indonesia, negosiasi antara tradisi dan modernitas dijelaskan oleh Abdurrahman Wahid dalam konsepsinya tentang ‘dinamisasi’ dalam tradisi keagamaan. Meski tradisi selalu dianggap baik, tetapi ia akan selalu berhadapan dengan kenyataan sosial yang terus menerus berubah. Dinamisasi

³ Jainuri, A. “Tradisi dan Modernitas; Mencari Titik Temu”. *Musyawahar Nasional Tarjih ke-28, pada 27-29 rabiul akhir 1435 H/27 Februari-1 Maret 2014* (pp. 1-8). Palembang: Musyawahar Nasional Tarjih ke-28.

menurutnya adalah suatu aksi rasional yang sambung menyambung dalam suatu keterpaduan untuk memahami, mengubah, mempertahankan kebudayaan itu sambil memberikan kemungkinan untuk diubah lagi demi kehidupan berkelanjutan menuju kehidupan sosial yang manusiawi. Dengan pengertian ini, setiap perubahan memiliki tantangan dan persoalan; dan jalan ke arah perubahan perlu menyediakan ruang terhadap perubahan lanjutan. Dalam konteks ini, Wahid menekankan pentingnya arti dinamisasi dalam tradisi, agar sebuah tradisi bisa terus hidup, tetapi pada saat yang sama bisa menjadi alat untuk menggerakkan perubahan dan meresponnya. Proses dinamisasi ini dapat dimunculkan melalui penggalakan kembali nilai-nilai hidup lama yang positif, yaitu tradisi yang ada, selain itu juga mencakup penggantian nilai-nilai lama dengan nilai-nilai baru yang dianggap lebih sempurna. Proses penggantian nilai ini disebut modernisasi, dan dengan sendirinya pengertian modernisasi terkandung dalam dinamisasi itu. Dalam kata dinamisasi di sini, mengandung pemahaman “perubahan ke arah penyempurnaan keadaan dengan menggunakan sikap hidup, nilai-nilai, dan peralatan yang telah ada,” yang berarti perubahan terus menerus sebagai bagian dari upaya kemanusiaan penyempurnaan kualitas masyarakat itu sendiri dengan berpijak pada tradisi. Dan menurut Wahid, dinamisasi itu sendiri, bukanlah westernisasi.⁴

Pesantren, antara Tradisi dan Modernitas

Keberadaan pesantren dalam sejarah bangsa Indonesia sudah dikenal sejak 500 tahun silam, dimana keberadaan lembaga pendidikan yang khas Indonesia (*indigeneous*) ini mampu berperan serta dalam menciptakan transformasisosial, ekonomi dan politik pada saat itu. Dalam perkembangannya, pesantren kini mengalami pelbagai tantangan, baik dari pengaruh globalisasi, maupun pengaruh konflik sosiologis, politis maupun teologis diantara pesantren sendiri. Pesantren merupakan institusi pendidikan Islam yang memiliki beberapa unsur utama, yakni Kiai, Kitab Kuning, Masjid, Santri, dan Asrama Pemandokan. Dalam sejarahnya, unsur-unsur pokok dalam pesantren ini secara efektif mendorong munculnya Islamisasi

⁴ Abdurrahman Wahid, *Islamku, Islam Anda, Islam Kita; Agama Masyarakat Negara Demokrasi* (Jakarta: Yayasan Abad Demokrasi, 2011)

di Nusantara.⁵ Bahkan dalam perkembangannya, pesantren menjadi lembaga pendidikan yang berhasil melakukan transformasi dalam mendorong perjuangan umat Islam untuk melawan kolonialisme dan imperialisme. Dalam sejarahnya, pesantren telah mampu menjadi kekuatan yang mampu mendorong kesadaran kritis bagi masyarakat, sehingga keberadaan pesantren mendorong pemerintah Belanda memberlakukan kebijakan yang mengontrol serta mengendalikan keberadaan pesantren di Nusantara. Bahkan, secara ketat, pemerintah Belanda melakukan seleksi ketat terhadap implementasi kurikulum dan siapa saja yang diperbolehkan untuk mengajarkan pendidikan agama. Dalam sejarahnya, kebijakan ini, dilanjutkan oleh pemerintah Jepang,⁶ berdasarkan aspek kesejarahan ini, secara umum peran pesantren baik secara sosial politik dan ekonomi dan budaya secara jelas muncul dalam sejarah bangsa Indonesia khususnya di era sebelum dan sesudah kemerdekaan, namun sebaliknya keberadaan pesantren sendiri mengalami berbagai tekanan baik di era kolonial maupun pasca kolonial.⁷

Sebagaimana kondisi di era kolonial, pesantren di era pasca kolonial atau kemerdekaan juga mengalami tantangan yang menyebabkan menurunnya dinamika pesantren, sebagaimana yang muncul dari kebijakan pemerintah di tahun 1949, di mana pemerintah membuka ruang seluas-luasnya pendidikan umum, yang nantinya lulusan dari pendidikan umum ini akan diproyeksikan untuk jabatan-jabatan administratif di pemerintahan. Kebijakan ini berdampak pada banyaknya pesantren-pesantren kecil di nusantara yang tutup karena ketiadaan santri. Masyarakat mulai lebih mementingkan pendidikan formal umum dari pada harus menyekolahkan anaknya untuk menjadi santri di pesantren, dengan alasan untuk bisa menempati posisi administratif di pemerintahan. Kenyataan ini sungguh ironi, mengapa di era kolonial, meskipun pesantren mendapat tekanan dan pembatasan, namun pada kenyataannya justru menjadi lembaga pendidikan yang diprioritaskan oleh

⁵ Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren; Studi Pandangan Hidup Kyai* (Jakarta: LP3S), 32.

⁶ Lihat sejarah perkembangan Pesantren ini secara detail di Hasbullah, 1999, 144, atau di Dhofier, 1985, 49-55.

⁷ Hasbullah, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia: Lintasan Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan* (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 1999), 144.

masyarakat, namun justru setelah kemerdekaan keberadaan pesantren mengalami penurunan dan ditinggalkan oleh masyarakat Islam di Indonesia⁸

Meskipun pada umumnya peran pesantren mampu berperan secara aktif dan strategis bagi perubahan masyarakat, juga keberadaannya hingga kini mampu beradaptasi dalam menyelesaikan persoalan baik di era kolonial maupun pasca kemerdekaan, namun kemunculan globalisasi saat ini menjadi tantangan yang serius bagi keberlanjutan pesantren di masa mendatang. Globalisasi yang ditandai dengan adanya *global village*, yakni menjadikan situasi dan kondisi pada suatu masyarakat tidak lagi dibatasi dengan adanya teritori atau wilayah tertentu, namun karena kecanggihan teknologi dan arus informasi menjadikan arus informasi menjadi mendunia. Hal ini tentu menjadi tantangan bagi dunia pesantren yang selama ini berfungsi sebagai penjaga tradisi dan nilai-nilai ajaran agama. Globalisasi tidak hanya memunculkan pertarungan nilai, doktrin teologis dari satu agama tertentu, namun keberadaan globalisasi akan berdampak pada eksistensi pesantren bila keberadaannya tidak mampu berbenah diri baik pada sisi manajemen pendidikan yang digunakan maupun pada kurikulum yang digunakan.⁹

Rasionalisasi Pendidikan Pesantren; antara *al-Muhafazah* dan *al-Tajdid*

Berbagai tantangan, bahkan ancaman selama ini menyelimuti dunia pendidikan pesantren, mulai dari dinamika sosio-ekonomi dan politik yang menyertainya. Keberadaan pesantren yang mampu merespon hingga kini, meskipun terdapat sejumlah pesantren yang mulai sepi dan ditinggalkan oleh para santrinya menegaskan bahwa pesantren perlu merumuskan strategi bagaimana sistem pendidikan di pesantren bermulti dimensi yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Hal ini juga dimaksudkan pada bagaimana *out-put* pesantren dapat berperan serta dalam kehidupan di masyarakat sesungguhnya, tidak saja dalam persoalan keagamaan namun juga sosio, ekonomi, politik, teknologi serta berbagai dimensinya. Karena demikian, pesantren tidak bisa mengelakkan diri untuk melakukan evaluasi, introspeksi yang didasarkan pada prinsip *al-muhafazah 'ala al-*

⁸ Dhofier, *Tradisi Pesantren*, 49-55.

⁹ Wahid Zaini, *Santri dalam Era Globalisasi, Dinamika Kaum Santri* (Yogyakarta)

qadīm al-ṣāliḥ wa al-akhḍhu bi al-jadīd al-aṣlah’, maupun lebih pada paradigma bagaimana berkreatifitas, berproduksi, dan bercrepta dan karsa tentang sesuatu yang baru, *al akhdhu bi al-tajaddudi*, tanpa meninggalkan nilai dan tradisi lama yang masih berfungsi, bermanfaat dan dibutuhkan oleh masyarakat Islam. Dengan demikian, konsep *al-akhḍhu* perlu dire-orientasikan pada paradigma produktifitas; kreatifitas. Karena demikian, paradigma pesantren, baik pada perumusan nilai, prinsip pengembangan manajemen dan sistem pendidikannya perlu berpijak pada paradigma ini.

Berpijak pada pandangan seperti ini, realitas sosial pendidikan pesantren saat ini memiliki beberapa persoalan yang rumit dan krusial, mulai dari manajemen yang lebih berorientasi pada figur-ketokohan, pengelolaan tidak berbasis pada sistem, hingga implementasi kurikulum yang tidak berbasis design dan perencanaan, serta metode dan sarana pendukung yang belum optimal. Pelbagai persoalan ini tentu menjadi persoalan pesantren secara kelembagaan, namun persoalan lain yang sama menjadi tantangan bagi dunia pendidikan pesantren saat ini adalah dinamika sosio-politiknya. Terdapat sejumlah pesantren yang terlibat aktif dalam pertarungan kepentingan di wilayah politik praktis. Realita ini menjadi *trend* di sejumlah pesantren di Indonesia terutama menjelang pemilu dan pilpres. Bila peasantren tidak didukung dengan adanya sistem pendidikan yang mapan, tentu dampak negatif dari konstalasi pesantren pada wilayah politik ini adalah menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemahaman pesantren sebagai pusat pendidikan Islam yang selama ini menjadi prioritas utama.¹⁰

Fenomena problematika pendidikan pesantren saat ini juga berhubungan erat dengan banyaknya lulusan pesantren yang tidak memiliki konsistensi antara pemahaman ilmu agama yang telah diperoleh dengan aktualisasi dari keilmuannya di masyarakat. Implikasi dari fenomena ini adalah banyaknya lulusan pesantren yang tidak konsisten dengan ke-santriannya-sebagaimana yang telah dipelajari dan dikuasanya di pesantren. Persoalan ini bisa berkaitan erat dengan rendahnya pemahaman dan penghayatan yang selamaini dipelajari, karena kurikulum yang ada

¹⁰ Yasmadi, *Modernisasi Pesantren* (Jakarta: Ciputat Press), 79.

masih lebih menekankan pada aspek rasio, tidak pada sejauhmana pembentukan karakter Islami dapat dijadikan tolok ukur utama dari implementasi kurikulum tersebut. Kurang memperhatikan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai bagian utama dari kurikulum yang perlu dikuasai oleh para santri di pesantren.¹¹

Berdasarkan fenomena tersebut, maka paradigma pengembangan sistem pendidikan pesantren yang sesuai dengan situasi dan kondisi saat ini perlu memperhatikan beberapa dimensi; yakni lebih menekankan aspek pengembangan akhlak, atau karakter yang tidak hanya bersifat teoretik namun pada praktik keseharian, merumuskan visi dan misi pesantren secara jelas, modernisasi manajemen kelembagaan, pengembangan kurikulum dengan memadukan dengan kebutuhan masyarakat serta memberikan *life skill* yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Dalam faktanya, sebagian besar pesantren yang ada saat ini belum memiliki visi dan misi yang dirumuskan berdasarkan kebutuhan masyarakatnya, apalagi permusan perencanaan pengembangan strategis dari peantren tersebut di masa mendatang. Fenomena ini tentunya menjadika keberadaan pesantren stagnan, ibaratkan buih dilautan yang mengalir mengikuti arus gelombang tanpa tujuan. Realitas ini tentu membutuhkan proses penyadaran dan pemberdayaan pesantren. Pemberdayaan ini bias dilakukan oleh akademisi, atau pemerintah atau lembaga sosial yang kompeten di bidangnya. Dengan perumusan visi misi dan renstra yang jelas, tentu keberadaan pesantren di masa mendatang akan lebih optimal dalam mengembangkan fungsinya sebagai institusi pendidikan keagamaan di masyarakat.

Perumusan visi-misi dan renstra bagi pesantren tersebut tentunya perlu diimbangi dengan upaya modernisasi manajemen pesantren, dengan membagi devisi kerja yang jelas, melakukan control disetiap kegiatan yang dilakukan, serta mengevaluasi system yang ada, serta memberdayakan potensi untuk pengembangan dan keberlanjutan lembaga adalah langkah-langkah penting yang perlu dirumuskan. Dengan melakukan rasionalisasi manajemen pesantren ini, tentu akan menjadikan

¹¹ Yasmadi, *Modernisasi*, 79.

Pesantren lebih efisien dan efektif dalam melaksanakan program-program pendidikannya. Dengan demikian, maka pembentukan santri yang diharapkan sesuai dengan visi-misi pesantren akan lebih rasional bisa tercapai.

Begitu pula dengan kurikulum pesantren, tidak sedikit pesantren yang tidak memiliki rumusan kurikulum pendidikan, apalagi untuk melakukan *review* apakah kurikulum yang ada sesuai dengan dimensi persoalan dan kebutuhan masyarakat saat ini. Fenomena ini tentu membutuhkan suatu terobosan penyusunan kurikulum bagi pesantren yang lebih integratif antara pendidikan keagamaan dengan pengetahuan dan skill yang dibutuhkan oleh masyarakat, apabila kebutuhan ini tidak terpenuhi, kemungkinan besar pesantren akan tenggelam bahkan ditinggalkan oleh masyarakat karena dianggap tidak *up-to date* atau kurang menarik bila ditinggalkan oleh lembaga pendidikan lainnya di luar pesantren.

Kebutuhan lain yang sangat mendesak bagi lembaga pendidikan pesantren, adalah memperkuat *icon* pesantren pada aspek pengembangan karakter, kepribadian atau akhlak karimah. Alasan utama yang menjadi pilihan masyarakat untuk menjadikan pesantren sebagai pilihan utama mereka adalah pada aspek ini, yakni pembentukan nilai-nilai akhlak islami. Oleh karenanya, pembentukan karakter akhlak ini, dimulai dari memperbanyak materi serta aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari bagi santrinya untuk mengembangkan kepribadian Islam yang karimah. Pengembangan materi kepribadian ini, tentu tidak terlepas dari ruang lingkup ajaran tasawuf, ironinya, terdapat sejumlah pesantren yang memahami tasawuf sebagai suatu ajaran yang menghambat perkembangan Islam, bahkan tidak mengenalkan secara luas dalam kurikulumnya. Karena demikian, pola penyusunan di pesantren menjadi kontradiksi dan mengalami in-efisiensi. Misalkan memberikan materi ilmu alat dalam dengan porsi yang banyak, tanpa disertai dengan praktik dan pembentukan budaya bahasa, sementara materi tentang al-Quran, tafsir, *hadith*, dan *tasawuf* dengan porsi sedikit.¹²

¹² Nurcholish Madjid, *Bilik-Bilik Pesantren* (Jakarta: Paramadina, 1997), 8.

Kesimpulan

Refleksi terhadap keberadaan pesantren dan sistem pendidikan yang dikembangkan seharusnya dirumuskan dengan paradigma pengembangan pendidikan pesantren yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat Islam di masa depan, tanpa terjebak dalam dikotomi tradisi dan modernitas yang mengungkung. Dengan melakukan koreksi konstruktif terhadap sistem pendidikan yang sudah dikembangkan saat ini, maka pembacaan kebutuhan situasional dan kondisional yang ada di masyarakat akan menjadikan pendidikan pesantren tidak harus terjebak pada persolan salafiyah dan kholafiyah. Sebaliknya akan membuka ruang lembaga pendidikan formal, nonformal dan informal yang ada, dengan memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi menjadi sebuah kebutuhan saat ini. Berdasarkan pemahaman ini, diharapkan alumni pesantren mampu bersaing secara global, dan siap mewarnai tantangan globalisasi dengan tetap menjadikannya arus yang lebih Islami, yakni sesuai dengan nilai dan prinsip agama Islam tanpa harus meninggalkan aspek-aspek yang dianggap tradisional meski tetap relevan.

Referensi

- Dhofier, Zamakhsyari. 1985, *Tradisi Pesantren; Studi Pandangan Hidup Kyai*. Jakarta: LP3ES.
- Hasbullah. 1999. *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia: Lintasan Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan*. Jakarta: PT. Grafindo Persada.
- Jainuri, A. 2014. *Tradisi dan Modernitas; Mencari Titik Temu*. Musyawarah Nasional Tarjih ke-28, pada 27-29 rabiulakhir 1435 H/27 Februari-1 Maret 2014 (pp. 1-8). Palembang: Musyawarah Nasional Tarjih ke-28. Jakarta: Yayasan Abad Demokrasi
- Madjid, Nurcholih. 1997. *Bilik-Bilik Pesantren*. Jakarta: Paramadina.
- Martono, N. 2012. *Sosiologi Perubahan Sosial*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Momen, M. 1999. *The Phenomenon of Religion*. Oxford: Oneworld.
- Wahid, Abdurrahman. 2011. *Islamku, Islam Anda, Islam Kita; Agama Masyarakat Negara Demokrasi*.
- Yasmadi. 2002. *Modernisasi Pesantren*. Jakarta: Ciputat Press.
- Zaini, Wahid A. 1995. *Santri dalam Era Globalisasi, Dinamika Kaum Santri*. Yogyakarta